



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

TESIS

**HAERDIN
1620622152**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2019**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

HAERDIN

1620622152

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Haerdin
NRP : 1620622152
Tanggal : 3 Mei 2019

Jakarta, 3 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Haerdin

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haerdin
NRP : 1620622152
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Mei 2019
Yang menyatakan

Haerdin

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Haerdin

NRP : 1620622152

Program Studi : Magister Hukum

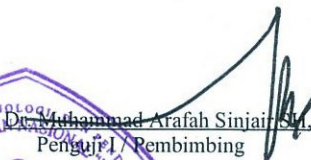
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N
Ketua Penguji




Dr. Muhammad Arafah Sinjai, S.H., M.Hum
Penguji I / Pembimbing


Dwi Desi Yati Tarina, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Muhammad Hatta, SH, MKn
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 3 Mei 2019

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

HAERDIN

ABSTRAK

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali tidak berjalan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemerintah. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dan penyelewengan berupa perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi? 2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tindak pidana korupsi dapat terjadi mulai dari tahap persiapan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi pertanggungjawaban pribadi. Parameter adanya pertanggungjawaban pribadi adalah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan parameter pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. 3. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir T.A. 2012 (Putusan PN Medan Nomor 64/Pid.Sus. K/2013 PN. Mdn) dan putusan No. 74/Pid.Sus/2014/PN.Makassar telah sesuai dengan ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yakni berdasar kepada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada delik tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999.

CRIMINAL RESPONSIBILITIES OF CRIMINAL ACTORS IN CORRUPTION PROJECTS OF GOODS AND SERVICES

HARDIN

ABSTRACT

The implementation of government goods / services procurement often does not work in accordance with the mechanism of procurement of goods / services set by the government. This is evidenced by the many irregularities and fraud in the form of acts of corruption which cause losses to the state and / or the country's economy. The problems in this study are 1. What are the legal arrangements regarding the procurement of government goods and services and their relationship to criminal acts of corruption? 2. What is the criminal responsibility of the perpetrators of corruption in the government procurement of goods and services in terms of Law Number 31 Year 1999 Juncto Law Number 20 Year 2001 concerning Amendments to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes? 3. What is the criminal responsibility of the perpetrators of corruption in the government procurement of goods and services? While the purpose of this study is 1. To analyze the legal arrangements regarding the procurement of government goods and services and their relation to corruption? 2. To analyze the criminal liability of perpetrators of corruption in government procurement of goods and services projects in terms of Law Number 31 Year 1999 Juncto Law Number 20 Year 2001 concerning Amendments to Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. 3. To analyze the criminal liability of the perpetrators of corruption in the government procurement of goods and services. With the juridical normative research method with a case study approach, it is known that 1. Legal arrangements regarding the procurement of government goods and services and their relation to corruption are contained in Presidential Regulation (Perpres) Number 54 of 2010 Jo. Presidential Regulation Number 35 Year 2011 Jo. Presidential Regulation Number 70 of 2012 Jo. Perpres Number 172 of 2014 Jo. Presidential Regulation Number 4 of 2015 concerning Procurement of Government Goods / Services. In the procurement of government goods / services, corruption can occur starting from the procurement preparation stage up to the implementation stage of the procurement of goods and services. 2. The criminal responsibility of the perpetrators of corruption in the government procurement of goods and services in terms of Law Number 31 Year 1999 Juncto Law Number 20 Year 2001 concerning Amendments to Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crime will be the responsibility position while personal error will be a personal responsibility. The parameter of personal liability is to commit acts against the law and abuse of authority. While the parameters of criminal liability are no criminal principles without errors. 3. The criminal responsibility of the perpetrators of corruption in the government procurement of goods and services occurred at the Toba Samosir District Health Office T.A. 2012 (Medan District Court Decision Number 64 / Pid.Sus. K / 2013 PN. Mdn) and decision No. 74 / Pid.Sus / 2014 / PN.Makassar is in accordance with the provisions concerning Corruption Crime in Indonesia which is based on Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime Jo Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Where the defendant's actions have fulfilled the elements in the offense of corruption in the corruption set out in article 3 of Law No. 20 of 2001 Jo Article 18 of Law No. 31 of 1999.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA”

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati,Ak,CPMA,CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan selaku Pembimbing I.
4. Dr. Muhammad Arafah Sinjair,SH,M.Hum, Pembimbing II.
5. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
6. Seluruh rekan-rekan penulis baik di teman–teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional-UPN "Veteran" Jakarta.
7. Seluruh rekan-rekan, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta (bapak, ibu, suami dan anak tercinta dan tersayang yang masih ada di dalam kandungan yang selalu mendukung dan menemani bundanya untuk menyelesaikan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan) dan yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 3 Mei 2019

Haerdin

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
1.5.1. Kerangka Teori.....	12
1.5.2. Kerangka Konseptual	19
1.6. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
II.1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana	15
II.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
II.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
II.1.3. Pertanggung Jawaban Pidana	18
II.2. Tindak Pidana Korupsi.....	25
II.2.1. Pengertian Korupsi.....	25
II.2.2. Tindak Pidana Korupsi.....	26
II.2.3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	29
II.2.4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	31
II.2.5. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	34
II.2.6. Akibat Korupsi	35
II.2.7. Peraturan Perundangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .	37
II.2.8. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	38
II.3. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa	41
II.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	41
II.3.2. Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	43
II.3.3. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.....	44
II.3.4. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	46
II.3.5. Komponen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	64
II.3.6. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah	66
II.3.7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	68
II.3.8. Pola Penyimpangan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa	69
BAB III METODE PENELITIAN	73
III.1. Tipe Penelitian	73
III.2. Sifat Penelitian	73
III.3. Sumber Data.....	74

III.4. Metode Pengumpulan Data.....	75
III.5. Metode Analisis data.....	76

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA 79

IV.1. Pengaturan Hukum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi	79
IV.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	93
IV.3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa.....	98

BAB V PENUTUP 121

V.1. Kesimpulan	121
V.2. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA.....	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	